

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Warga negara Indonesia banyak yang menjadi pekerja asing di beberapa negara Asia, salah satunya di Malaysia. Namun, banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang berstatus ilegal atau gelap sebagaimana informasi yang disampaikan Mimin Mintarsih, ketua Pengurus Cabang Istimewa Muslimat Nahdlatul Ulama' (PCIMNU) Malaysia dan pendiri lembaga pendidikan untuk anak-anak Indonesia di Malaysia. Lembaga pendidikan tersebut dikenal dengan nama sanggar bimbingan. Menariknya, siswa sanggar bimbingan ini sudah mencapai 1000 lebih di 44 cabang yang tersebar di semenanjung Malaysia.¹

Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 adalah lembaga pendidikan yang terletak di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Lembaga ini didirikan pada 2019 yang bertujuan untuk memberi wadah pendidikan terhadap anak-anak imigran gelap yang semula tidak memiliki jembatan untuk menempuh pendidikan secara formal maupun non formal. Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 juga merupakan lembaga pusat dari 44 cabang yang ada di semenanjung Malaysia, dan diakui sebagai sanggar bimbingan yang paling banyak siswanya dibanding sanggar bimbingan yang lain. Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 juga merupakan sanggar bimbingan dengan fasilitas pendidikan paling memadai dibanding sanggar bimbingan yang lain, seperti tempat dan tenaga pengajar.

Di samping melakukan aktivitas belajar mengajar dalam kelas, biasanya para guru sanggar bimbingan ini juga menerapkan praktik dakwah sekaligus menyampaikan pesan-

¹ Mimin Mintarsih, Pendiri Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5, *Wawancara Langsung* (13 Oktober 2023)

pesan keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan kepada siswa. Namun, sebenarnya proses penyampaian pesan dakwah Islam dan keindonesiaan tersebut tidak selalu disampaikan dalam waktu pembelajaran, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan luar ruangan, seperti penyampaian ilmu-ilmu fikih setelah salat zuhur, kegiatan apel pagi dan upacara bendera.²

Adanya sanggar bimbingan ini tentu sangat membantu bagi TKI Malaysia, karena anak-anak mereka sudah bisa menempuh pendidikan dengan mudah untuk belajar ilmu agama dan nilai-nilai Pancasila tanpa harus pulang ke Indonesia, meski kenyataannya lembaga tersebut masih belum mendapatkan legalitas dari pemerintah Malaysia, baik dari pihak kepolisian atau imigrasi. Tidak hanya dari pemerintah Malaysia, pada kenyataannya lembaga ini juga belum diberi izin resmi secara administratif oleh pemerintah Indonesia, meski keberadaanya Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 sudah diakui dan diperbolehkan untuk beroperasi.³

Merujuk pada aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD RI), Nomor 35 tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 4 Bab 2 Ayat (1), tentang Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan, lembaga pendidikan dapat didirikan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; *pertama*, hasil studi kelayakan. *Kedua*, isi pendidikan. *Ketiga*, jumlah dan kualifikasi pendidikan. *Keempat*, sarana dan prasarana pendidikan. *Kelima*, sistem sertifikasi dan evaluasi. *Keenam*, manajemen dan proses pendidikan.⁴

² Observasi (13 Agustus 2023)

³ Mimin Mintarsih, Pendiri Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5, *Wawancara Langsung* (13 Oktober 2023)

⁴ *Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, (2014).

Menurut aturan di atas, semua pihak yang ingin mendirikan suatu lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, atau informal, wajib memenuhi persyaratan tersebut secara utuh, tidak terkecuali lembaga Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 yang terletak di Malaysia. Kalau melihat dari manajemen proses pendidikan serta beberapa sarana dan prasarana yang ada di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5, seharusnya Kemendikbud RI tidak mengizinkan lembaga ini beroperasi, karena selain tidak memiliki legalitas, lembaga ini juga tidak mencukupi persyaratan (fasilitas belajar belum mencukupi dan manajemen proses belajar mengajar masih kurang sistematis)⁵.

Dalam sistem pendidikan Malaysia, Kementerian Kerajaan Malaysia mewajibkan belajar untuk warganya selama 11 tahun, yaitu untuk pendidikan rendah selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Pendidikan dasar ini diwajibkan untuk semua anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Para pelajar diwajibkan mengikuti ujian negara di tahun terakhir pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Malaysia telah memberikan pelayanan pendidikan kepada semua penduduk yang tinggal di dalam wilayah teritorial Malaysia, termasuk Sabah. Setiap penduduk di perbolehkan untuk mengikuti atau mendapatkan pelayan pendidikan di sekolah-sekolah.⁶

Sebagai negara tuan rumah, Malaysia lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada warga negaranya sendiri. Untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warganegaranya maka kapasitas sekolah yang didirikan adalah sesuai dengan jumlah warga negara Malaysia yang memerlukan pelayanan pendidikan. Sedangkan warga negara asing yang ingin memperoleh pelayanan pendidikan menunggu sampai dengan

⁵ Observasi (13 Agustus 2023)

⁶ Anita, Darwis, dan Aswin baharuddin, "Kerjasama Indonesia Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah)," *Hasanuddin Journal of International Affairs* , Vol. 1 No. 2 Agustus (2021): 195, <https://doi.org/10.31947/hjirs.v1i2.17737>.

adanya ketersediaan tempat di sekolah. Persyaratan umum untuk memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia antara lain merupakan warga negara Malaysia, warga negara asing yang legal, mempunyai cukup umur, dan tersedianya tempat.⁷

Menurut Undang-Undang Pendidikan Negara Malaysia tahun 1996, bagian VII, Bab 1 ayat 79 No (1) dan (2), tentang pendaftaran lembaga pendidikan; *pertama*, sesuai dengan ketentuan lain Undang-undang ini. Setiap lembaga pendidikan wajib terdaftar berdasarkan Undang-undang ini. *Kedua*, Permohonan pendaftaran berdasarkan Undang-undang ini diajukan kepada Panitera Jenderal sesuai dengan cara yang ditentukan.⁸

Oleh karena itu, berdasarkan informasi langsung yang didapatkan oleh peneliti, bahwa Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur memang tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan di atas, karena dari awal lembaga didirikan, pendiri lembaga sanggar bimbingan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang di atas. Pendiri hanya melakukan komunikasi dan meminta izin dari pihak KBRI Kuala Lumpur dan pihak KBRI pun telah mengizinkan.

Selain itu, Undang-Undang Pendidikan Negara Malaysia juga mengatur tentang meteri atau bahan ajar yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Nasional Negara Malaysia, yang harus dipersiapkan dan diberikan oleh setiap lembaga terhadap siswa. Bahan ajar tersebut harus dilengkapi pada saat pendiri lembaga mengajukan pendaftaran terhadap Panitera Jenderal sebagaimana yang dimaksud dalam Bab 1 ayat 79 No (1) dan (2) sebelumnya. Berikut ini bunyi Undang-Undang tentang mata pelajaran inti dalam kurikulum Nasional Malaysia:⁹

⁷ Ibid.

⁸ *Undang-Undang Pendidikan Swasta Negara Malaysia Bagian VII Lembaga Pendidikan Swasta* (1996).

⁹ Ibid.

1. Mata pelajaran inti dalam Kurikulum Nasional menjadi landasan fundamental pendidikan siswa di semua sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mata pelajaran inti pada tingkat sekolah dasar adalah; (a) Bahasa Nasional; (b) Bahasa Inggris; (c) Bahasa Mandarin, untuk siswa di sekolah bertaraf nasional (Tionghoa); (d) Bahasa Tamil, untuk siswa di sekolah bertaraf nasional (Tamil); (e) Matematika; (f) Sains; (g) Studi Lokal; (h) Pendidikan Islam, bagi peserta didik yang beragama Islam; dan (i) Pendidikan Akhlak, bagi siswa yang tidak beragama Islam. Mata pelajaran inti di tingkat menengah.

Lembaga sanggar bimbingan ini bukan hanya tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pendidikan Indonesia, akan tetapi juga belum memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dan disahkan oleh pemerintah Malaysia

Oleh karena itu, jika Undang-Undang yang mengatur kurikulum dia atas (Kurikulum Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum Nasional Malaysia) di korelasikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lembaga Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 masih tidak memenuhi persyaratan untuk didirikan dan dioperasikan, karena; *pertama*, siswa sanggar bimbingan ini rata-rata masih berstatus ilegal (tidak memiliki identitas diri). *Kedua*, lembaga Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 tidak melakukan proses pendaftaran sebagai mana yang ditagaskan dalam undang-undang Malaysia sebelumnya. *Ketiga*, bahan ajar yang diterapkan pada saat ini hanya meliputi, Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarga Negara

(PPKN), IPS, Fikih, dan Bahasa Inggris.¹⁰ Beberapa masalah ini tentu menjadi hambatan bagi berjalannya proses pendidikan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5.

B. Fokus Penelitian

Melihat masalah yang telah disinggung di atas, maka untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap beberapa poin di bawah ini:

1. Bagaimana strategi pengurus Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur Malaysia untuk operasional lembaga?
2. Apa saja pesan dakwah keislaman dan keindonesiaan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur Malaysia?
3. Bagaimana model penyampaian dakwah keislaman dan keindonesiaan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memaparkan:

1. Strategi yang dilakukan pengurus Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Malaysia sehingga bisa dioperasikan.
2. Pesan dakwah keislaman dan keindonesiaan yang disampaikan guru Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Malaysia.
3. Model-model penyampaian dakwah keislaman dan keindonesiaan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur Malaysia.

¹⁰ Observasi (11 Agustus 2023)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini berguna sebagai salah satu tambahan koleksi di Perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam proses pengerjaan karya-karya ilmiah.
- b. Penelitian ini berguna sebagai pendukung untuk meningkatkan wawasan mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) secara khusus dan mahasiswa IAIN Madura secara umum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur Malaysia, penelitian ini sebagai *branding* terhadap publik, bahwa di Kuala Lumpur Malaysia sudah ada lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak TKI.
- b. Penelitian ini merupakan edukasi dan inspirasi terhadap mahasiswa IAIN Madura untuk melakukan penelitian selanjutnya yang serupa dengan tetap mencari kekurangannya sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

Berikut adalah paparan definisi istilah dalam penelitian ini:

1. Pesan Dakwah

Pesan dakwah Islam adalah semua informasi yang baik dan benar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan hadis.

2. Model

Model merupakan sebuah cara yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan atau merealisasikan suatu kegiatan atau pekerjaan.

3. Keislaman

Keislaman secara umum dapat diartikan seluruh tindakan, perilaku, giatan, atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis.

4. Keindonesian

Keindonesiaan adalah setiap yang bersangkutan dengan Indonesia sebagai suatu negara, baik dari kebiasaanya, seni, kebudayaanya, keanekaragaman suku, dan agamanya. Artinya, ketika berbicara keindonesiaan, berarti berbicara Indonesia secara global, yaitu kemajemukan yang telah menjadi ciri-ciri dari nagera republik ini.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan karya orang lain, maka penulis mencoba mengumpulkan beberapa karya ilmiah hasil penelitian, baik berupa artikel atau skripsi, yang telah dilakukan atau ditulis oleh orang lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konteks skripsi ini ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Nuraeni Pebriani dan Dinie Anggraini Dewi
“Peran Guru dalam Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Bagi Siswa Sekolah Dasar di Era Globalisasi.” Pokok persoalannya ialah: *pertama*, peran guru dalam

menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi siswa sekolah dasar. *Kedua*, peran guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Kesimpulannya, yaitu peran guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi sangat penting bagi siswa. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat, karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Persamaannya dalam penelitian ini dengan yang akan diteliti ialah peran guru dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Sementara perbedaannya, yaitu penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada penyampaian nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman, bukan hanya nilai-nilai Pancasila.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Ningsi pada 2020 dengan judul “*Penerapan Komunikasi Dakwah Guru kepada Siswa Madrasah Aliyah Al-Khairat Biromaru*”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: *pertama*, penerapan komunikasi dakwah guru. *Kedua*, faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penerapan komunikasi dakwah kepada siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian Yuli Ningsih ini adalah penerapan komunikasi dakwah guru kepada siswa bertujuan untuk memperbaiki sifat atau perilaku siswa agar memiliki budi pekerti yang terpuji. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti ialah sama-sama berkenaan dengan

¹¹ Yulia Nuraeni Pebriani dan Dinie Anggraini Dewi “Peran Guru dalam Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Bagi Siswa Sekolah Dasar di Era Global,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 (1 Juni 2022): 2. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2746>.

dakwah, dan perbedaannya yaitu, penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan dakwah Islam serta penyampaian nilai-nilai keindonesiaan.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Daulay dan Evi Septiani dengan judul *“Komunikasi Dakwah dalam Penguatan Wawasan Keislaman Remaja.”* Artikel ini mengeksplorasi tentang komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Siti Rayana Hasibuan, seorang nenek yang menjadi guru ngaji di Desa Matondang. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Fokus penelitian yaitu: *pertama*, perjalanan dakwah Rayana Hasibuan. *Kedua*, bagaimana model komunikasi dakwah Siti Rayana Hasibuan. Kesimpulannya, yaitu dakwah menggunakan ketauladanan dengan penuh kedisiplinan, kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan lebih efektif digunakan untuk objek dakwah berupa anak-anak sekolah yang masih di bawah umur. Siti Rayana Hasibuan juga menggunakan media mimbar untuk menyampaikan pesan-pesan verbal sebagai penegasan terhadap dakwah non verbal yang telah ia lakukan. Kesamaan dari penelitian ini, ialah metode yang menggunakan kualitatif deskriptif dan pembahasannya tentang dakwah Islam. Sementara perbedaannya, penelitian ini hanya fokus terhadap pesan dakwah keislaman.¹³

¹² Yulianti Ningsi, “Penerapan Komunikasi Dakwah Guru kepada Siswa Madrasah Aliyah Al-Khairat Biromaru, (Skripsi, IAIN Palu), 44.

¹³ Hamdan Daulay dan Evi, “Komunikasi Dakwah Dalam Penguatan Wawasan Keislaman Remaja (Studi Kasus Dakwah Hajjah Siti Rayana di Sibuhuan, Sumatera Utara),” *Kalijaga Journal of Communication*, Vol. 2 No. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.14421/kjc.21.01.2020>.